ANALISIS LRA

BERBASIS LK PEMERINTAHAN

Pemikiran Dr Jan Hoesada, KSAP

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN .....
1 .....
II. MEMBANGUN DASAR ANALISIS LK PEMERINTAHAN .....
1 .....
II.1. Syarat analisis berbasis LK .....
1 .....
.....
.....
.....
II.2. Berbagai Pengertian penting 2
II.3. Konsep dasar analisis nisbah 5
II.4. Pemilihan baku untuk analisis 7
III. ANALISIS LRA BERHAMPIRAN *COMMON SIZE* 10
III.1. Realisasi sebuah pos anggaran banding anggaran pos tersebut 13
III.2. Persentase Anggaran Belanja Modal banding Jumlah Belanja pada suatu akhir periode akuntansi 14
III.3. Persentase Anggaran Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Pegawai banding seluruh Jumlah Belanja pada suatu akhir periode akuntansi 16
III.4. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Barang terhadap seluruh Jumlah Belanja 17
III.5. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Bunga terhadap seluruh jumlah belanja pada suatu akhir periode akuntansi 19

III.6. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Subsidi terhadap jumlah seluruh belanja, pada suatu akhir periode akuntansi ..... 20 .....
III.7. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Bantuan Sosial terhadap seluruh belanja, pada suatu akhir periode akuntansi 21
III.8. Persentase belanja menurut fungsi terhadap seluruh belanja pada tahun yang sama....21
III.8.1. Belanja Perlindungan Sosial terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 21
III.8.2. Belanja Pelayanan Umum terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 22
III.9. Persentase Belanja Pendidikan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 22
III.10. Persentase Belanja Pertahanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 23
III.11. Persentase Belanja Ketertiban & Keamanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 24
III.12. Persentase Belanja Ekonomi terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi yang sama 25
III.13. Persentase Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 25
III.14. Persentase Belanja Perumahan dan Pemukiman terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi ..... 25 .....
III.15. Persentase Belanja Kesehatan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 26
III.16. Persentase Belanja Pariwisata dan Budaya terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 26

III.17. Persentase Belanja Agama terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi 26
III.18. Persentase Belanja Pertanian terhadap seluruh Belanja 27
IV. ANALISIS LRA BERHAMPIRAN TREND ANALYSIS 27
IV.1. Analisis trend Pendapatan LRA 28
IV.2. Analisis trend Transfer LRA 29
IV.3. Analisis trend Belanja LRA 29
V. ANALISIS NISBAH KEUANGAN KHUSUS (*SPESIFIC RATIO ANALYSIS)* BAGI LRA 30
VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP 31

ANALISIS LRA

BERBASIS LK PEMERINTAHAN

I. PENDAHULUAN

Pertama, pada suatu pertemuan menjelang akhir tahun 2018 antara BPK dengan KSAP, BPK bertanya; apakah terdapat upaya dan pemikiran KSAP untuk pedoman tafsir dan analisis LK untuk memetik nilai tambah informasi dari LK berbasis SAP, terkait komponen-komponen LK, terutama berbentuk elaborasi dan tafsir informasi termaktub dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), selaras *Penjelasan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang 17 tahun 2003 yang menyatakan; bahwa tugas LRA selain menyajikan informasi pendapatan dan belanja, LRA juga wajib menjelaskan* ***prestasi kerja*** *kementerian negara, lembaga, satuan kerja perangkat daerah dan badan lainnya.*

Kedua, pada pertemuan BPK dan KSAP tersebut (bukan dengan Kementerian Keuangan), BPK juga menanyakan kepada KSAP (sebagai sebuah lembaga penyusun standar[i]) tentang realisasi kewajiban pertanggungjawaban APBN/D oleh pemerintah dengan menyajikan LK dan Laporan Kinerja, sesuai UU 17/2003 dan PP 8 tahun 2006 dengan lampiran LAKIP.

Ketua KSAP (kelihatannya lebih sebagai pejabat Depkeu) menjelaskan aliran Laporan Kinerja dan latar-belakang mengapa tak disertakan sebagai Lampiran LK kepada BPK. Masalah ini tak di jawab dalam makalah ini.

Ketiga, pada Peraga Perkasa (*Power Point*) lembar ke 4 tayangan BPK, kembali BPK mempertanyakan realisasi pelaporan evaluatif tentang kinerja entitas pelaporan LK yang diperjanjikan pada *Pasal 25 Kerangka Konseptual SAP versi PP 71/2010,* sehingga makalah ini merupakan bahan masukan bagi BPK, KSAP dan Departemen Keuangan untuk menjawab pertanyaan BPK tersebut, karena sumberdaya ekonomi yang dikelola entitas pelaporan LK pemerintahan terkristalisasi dalam bentuk Neraca, LAK dan LRA, yang dikelola sesuai APBN/D.

Makalah berupa kutipan sebagian rencana penerbitan buku tentang **Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan**, karena penyajian makalah ini terfokus pada Analisis LRA.

II. MEMBANGUN DASAR ANALISIS LK PEMERINTAHAN

II.1. Syarat analisis berbasis LK :

- Bahan analisis adalah Laporan Keuangan entitas pelaporan LK Pemerintahan.
- Tidak ada bahan analisis dan informasi dari luar LK Pemerintahan.
- Bahan analisis LK harus 100% dari Laporan Keuangan.

- Analisis pra audit BPK. Apabila analisis dimaksud menjadi *appendiks*, informasi tambahan atau skedul (*schedules*) pada LK maka analisis menjadi bagian integral LK Bentuk Panjang, yang ikut diperiksa oleh auditor LK, terutama BPK. Dengan demikian, analisis termaktub pada LK pra-audit atau *Unaudited Financial Statement*. Sebagian analisis, misalnya analisis trend, menggunakan LK tahun buku yang lalu, maka LK tahun buku yang lalu itu harus ber-opini WTP.

- Analisis LK setelah LK memperoleh opini audit BPK. Apabila analisis LK menggunakan LK setelah di audit BPK, maka :

    a. Analisis LK dilakukan hanya bila LK mendapat opini WTP.

    b. Untuk analisis trend, LK tahun lalu harus mendapat opini WTP pula.

    c. Laporan Hasil Analisis LK tersebut adalah laporan yang tidak diaudit BPK, karena tidak diserahkan kepada BPK untuk diperiksa.

II.2. Berbagai Pengertian penting

Definisi akuntansi klasik mencakup tafsir LK dalam penggal kalimat terakhir definisi tersebut *(..... and interpretion the result therof)*, yang berarti Standar Akuntansi apapun boleh mengatur dan mencakupi analisis LK. Namun demikian, sampai hari ini belum ada Standar Internasional yang mengatur Analisis LK sebagai hasil (*result*) suatu proses pemilihan, penggolongan dan proses pelaporan transaksi/kondisi keuangan sebuah entitas LK.

Untuk keperluan PMK Pedoman Analisis Keuangan atau sebuah PSAP Analisis LK, maka pemakalah perlu mengurai beberapa definisi khusus bagi keperluan produk hukum tersebut.

- Sebuah LK terdiri atas kelompok (1) Laporan Akhir periode pada Neraca dan SiLPA, misalnya tanggal 31 Desember tahun 20X2, dan (2) kelompok Laporan sebuah periode akuntansi untuk LO, LRA, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal Neraca, yaitu mulai awal tahun atau 1 Januari 20X2 (yaitu setelah LK yang berakhir tahun 20X1) sampai dengan akhir tahun atau tanggal 31 Desember tahun 20X2.
  Terdapat perbedaan istilah **pos-analisis-LK** (makalah ini) dan **pos-LK** (dalam PP 71/2010 tentang SAP).

  Perbandingan (dalam satuan mata uang) sebuah pos dengan jumlah (dalam satuan mata uang) rumpun pos tersebut (mis. Rp. Saldo sub-rumpun Persediaan banding rumpun Rp. Aset Lancar) atau terhadap rumpun terbesar (mis. persediaan banding jumlah (seluruh) aset) untuk mendapat gambaran relatif (biasanya dalam peryataan %) besar pos tersebut dan analisis/tafsir makna ukuran-besar-relatif tersebut bagi pembaca LK.

Sub-rumpun aset misalnya adalah sub-rumpun Aset Lancar dan sub-rumpun Aset Non Lancar.

Sub-rumpun Liabilitas adalah sub-rumpun Liabilitas Jangka Pendek dan sub-rumpun Liabilitas Jangka Panjang.

Sub-rumpun aset-lancar terdiri dari berbagai pos aset tertentu yang bersifat dapat dicairkan (ditunaikan) dan/atau digunakan pada sebuah tahun buku setelah tanggal LK, misalnya, pos kas, pos persediaan, pos piutang, pos aset tetap.

Berbeda dengan berbagai literatur-akuntansi-klasik, pemakalah menggunakan istilah (1) pos-analisis-LK dan (2) istilah pos-LK.

Sebuah pos analisis LK mencakupi **satu atau lebih pos-pos LK serumpun**, misalnya pos analisis kas untuk LKPP sekurang-kurangnya mencakupi pos neraca Kas pada BI, Kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Kas pada Bendahara Penerimaan.

Untuk keperluan analisis, para Analis LK dapat menggunakan sebuah pos-LK tertentu saja, misalnya Pos Neraca bernama Kas pada BI untuk analisis nisbah terhadap seluruh sub-sub-rumpun Kas, atau terhadap sub-rumpun Aset Lancar, atau terhadap rumpun Aset pada suatu tanggal akhir periode LK, misalnya 31 Desember 20XX.

- Analisis *Common-Size* atau analisis-vertikal adalah analisis sebuah pos dengan berbagai sub-sub-jumlahnya (mis. Pos Kas pada BUN dengan jumlah seluruh kas), dengan suatu sub-jumlah (mis. Pos Kas pada BUN dengan jumlah aset lancar atau dengan jumlah. (mis. Pos Kas pada BUN dengan jumlah aset).

  Karena sebuah elemen dibanding dengan suatu jumlah di bawahnya, maka disebut analisis vertikal. Analisis vertikal secara ideal menggunakan pilihan dua sumber data, yaitu (1) LK Belum di Audit, dan (2) LK Telah diaudit Auditor Ekternal.

  Analis wajib menyatakan pada awal analisis tentang kualitas LK sebagai bahan baku analisis LK, apakah (1) LK *Unaudited*, (2) LK Audited beropini WIP sehingga seluruh informasi LK dapat digunakan analis, (3) LK Audited dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, menyebabkan *disclaim* (hanya) pada analisis butir-butir yang mendapat perkecualian tersebut.

Analis dilarang

- Menganalisis Neraca LK tahun analisis yang beropini Disklaimer atau pernyataan Nir-opini Audit *(No Opinion)* dari auditor eksternal.

- Analis dilarang menggunakan data diluar LK Auditan, karena data luar LK tidak berlabel WTP auditor LK, misalnya menghitung *Debt-Service Ratio* (DSR) yang menggunakan data GDP (di luar LK) sebagai pembagi jumlah Utang Negara.

  Data lain yang biasanya tidak terdapat pada LK Pemerintahan misalnya luas Pemda, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, mortalitas, cuaca, iklim, curah-hujan, dan bencana karena tak diwajibkan oleh SAP.

- Terdapat data LK tahun lalu pada sebuah LK. Walaupun *common size* menggunakan hanya sebuah LK, analisis bersikap waspada pada saat **menganalisis raihan atau beban** tahun analisis, misalnya raihan pendapatan pada LO apabila raihan tersebut terkontaminasi *LK Tahun Sebelumya* beropini tidak WTP.

- Karena masalah kesalahan pisah-batas (*cut off*) itulah, analis wajib memeriksa jurnal tindak-lanjut atas PSTP usulan auditor untuk LK tahun lalu dan jurnal tindak-lanjut atas PSTP usulan auditor untuk LK tahun analisis, yang mungkin berpengaruh pada analisis raihan atau beban.

- Analisis trend (*trend Analysis*) atau analisis-horizontal menggunakan beberapa tahun LK.

Salah satu tujuan LK Perbandingan antar Tahun dalam SAP adalah untuk analisis trend sebuah lini (atau *row)* LK yang berdampingan lintas tahun, misalnya pada Neraca-Perbandingan terdapat lini saldo Pos Kas pada BUN 31 Desember tahun 20X1 dan saldo Pos Kas pada BUN 31 Desember tahun 20X2, secara kasad mata pembaca LK dapat melihat langsung pada LK, apakah terjadi peningkatan/penurunan saldo Pos Kas pada BUN menuju 31 Desember tahun 20X2, dan menyimpulkan bahwa kondisi Pos Kas pada BUN tersebut (1) membaik/memburuk/tetap atau (2) makin sehat/makin tidak sehat/ tetap atau (3) makin efisien/makin tidak efisien/tetap bagi Sub-sub-rumpun Kas, bagi Sub-rumpun-Aset-Lancar atau bagi Rumpun-Aset PP-NKRI cq LKPP.

Analisis trend dilakukan untuk memperbandingkan kondisi keuangan beberapa tahun menggunakan hasil olah-analisis-vertikal (*common size* dan *spesific ratio analysis*), misalnya kondisi likuiditas *(current ratio, accid test ratio, quick ratio)* akhir tahun 20X2 banding tahun lalu cq akhir tahun 20X1, membaik atau memburuk.

Anslisis trend dengan perbandingan 2 tahun buku, membutuhkan 3 LK Auditan berstatus WTP, terutama untuk *analisis raihan tahun pertama* (terutama penjualan dan beban LO) tahun pertama, membutuhkan saldo awal tahun pertama-analisis berupa LK tahun buku nol berstatus WTP.

Trend data absolut (atau *raw* data) diperoleh dari Neraca Perbandingan, LO Perbandingan, LAK perbandingan dan LRA Perbandingan disebut Analisis Trend Tingkat 1 dengan demikian, penjajaran dua tahun buku pada LK, berupa Neraca Perbandingan, LO Perbandingan, LAK perbandingan dan LRA Perbandingan disebut Analisis Trend Tingkat 1.

Trend data relatif (atau trend dari ratio tertentu) diperoleh dari *Common size Analysis dan Spesific Ratio Manailsis* disebut Analisis Trend Tingkat Dua.

Neraca Perbandingan, LO Perbandingan, LAK perbandingan dan LRA Perbandingan disebut Analisis Trend Tingkat 1 sebagai misal, trend Nisbah Belanja Pegawai Pemda banding Jumlah Belanja Pemda beberapa tahun buku, menggambarkan sikap Pemda dalam etos kerja, efisiensi, perampingan organisasi Pemda, penerapan strategi *Reinventing The Govermnent,* boleh juga diperiksa hasilnya pada kenaikan nisbah Belanja Modal terhadap Jumlah Belanja pemda tersebut (*impact*, *output*), yang selanjutnya di luar LK, *outcome* tertengarai pada pertumbuhan kegiatan ekonomi, menurunnya pengangguran dan migrasi penduduk ke Pulau Jawa atau kota besar, peningkatan PDB Kapubaten dan *Income* Percapita Kabupaten tersebut.

Karena analisis trend berdaya prediksi, terutama trend dari nisbah-keuangan-tahunan (yang digambarkan *common-size* atau *spesific ratio analyiss* tahunan, yang diperbandingkan lintas tahun buku) maka dianjurkanlah pembuatan analisis trend tiga tahunan analisis, empat tahunan analisis atau lima tahunan analisis masa lalu. Analisis trend lintas tahun yang lebih dari (sekadar) dua tahun buku versi SAP niscaya lebih mampu menggambarkan kecenderungan (naik atau turun) suatu fenomena di masa depan.

- *Spesific ratio analysis* adalah nisbah yang tidak terdapat pada *common-size analysis*, misalnya nisbah kebangkrutan atau *Altman's Z-Score*, nisbah kemandirian entitas mengambil hikmah formula *Du Pont, Economic Value Added* dan lain-lain. Pemakalah tak menemukan *spesific ratio analysis* bagi analisis LRA Kepemerintahan.

II.3. Konsep dasar analisis nisbah

Ratio ((bah.Inggris) atau nisbah (bah.Indonesia) atau perbandingan (KBBI) antara beberapa hal, sekurang kurangnya dua hal. Hasil dari kalkulasi nisbah dapat berbentuk aritmatika bagi (misalnya A dibagi B), dapat berbentuk persentase (misalnya (A/A+B) X 100%)) bila A+B adalah 100%.

Sebagai misal, sensus menghasilkan jumlah penduduk NKRI suatu tahun adalah 250 juta, dengan rincian 150 juta wanita, 100 juta pria. Nisbah penduduk NKRI berdasar jenis adalah 60% Wanita, dan 40% Pria. Penyebutan nisbah penduduk wanita banding pria dapat pula dengan notasi 60/40 atau 1,5.

Untuk tafsir nisbah, sebuah nisbah di evaluasi dengan suatu tolok ukur. Misalnya Defisit Realisasi APBN tak boleh lebih besar dari 3% PDB, membutuhkan kalkulasi nisbah Defisit APBN banding PDB.

Dasar dari penggunaan nisbah apapun adalah ilmu tentang logika, digunakan pula pada ranah akuntansi keuangan bermuara pada LK berlogika ilmu akuntansi yang berbasis ilmu manajemen keuangan.

Misalnya :

- Nisbah Utang Ekuitas adalah perbandingan jumlah liabilitas (kewajiban) dengan jumlah ekuitas pada suatu tanggal tertentu, misalnya tanggal 31 Desember Tahun 20XX *(analisis common size)*.

- Nisbah Utang Ekuitas Akhir Tahun A dengan Utang Ekuitas Akhir Tahun B, sebuah entitas LK.
  Analisis dua tahap, yaitu:

  1. analisis *common size* untuk nisbah Utang-Ekuitas dari dua tanggal LK entitas sama,

  2. analisis trend hasil perhitungan butir 1.

- Nisbah Utang Ekuitas LK Entitas X Akhir Tahun A banding Nisbah Utang Ekuitas LK Entitas Y Akhir Tahun A (perbandingan kondisi DER dua entitas LK pada tanggal LK yang sama).

- Nisbah Cepat *(quick ratio)* adalah perbandingan Saldo Akhir Rumpun Kas **ditambah** Saldo Akhir Rumpun Piutang Jangka Pendek Dapat Cepat di Tunaikan, lalu **di bagi** Saldo Akhir Jumlah Liabilitas Jangka Pendek, pada suatu tanggal neraca pada sebuah entitas LK.

- Nisbah suatu rumpun belanja APBN/D vs Realisasi APBN/D, misalnya APBN Belanja Modal vs Realisasi Belanja Modal, adalah analisis LRA.

Rumpun jenis Nisbah adalah sebagai berikut:

- Bukan liputan makalah ini, *General, Non accounting), Non Financial Ratio* (Nisbah bukan ranah akuntansi dan bukan nisbah keuangan pada umumnya.
  Contoh: Nisbah Kematian Penduduk banding jumlah penduduk, trend kenaikan jumlah migrasi pencari kerja di LN banding trend kenaikan jumlah pengangguran tahun yang sama. Nisbah kematian bayi banding jumlah bayi lahir, jumlah/frekuensi bencana alam suatu Pemda (misalnya Wereng) banding jumlah ton panen budidaya tertentu (mis. padi) pada Pemda tersebut pada tahun yang sama.

- Bukan liputan makalah ini, *General, Non Accounting Financial Ratio* (Nisbah keuangan bukan ranah akuntansi)
  Contoh: Pendapatan percapita atau *income* percapita, PDB dibagi jumlah penduduk. GDP *growth* adalah analisis trend.

- Bukan liputan makalah ini, *Accounting Non-Financial Ratio*
  Contoh, Nisbah hasil produksi kualitas pertama dengan gunggungan kualitas 2 dan 3, kecepatan jahit par-karyawan jahit 3 daster perjam kerja produktif, dalam akuntansi manajemen, manajemen biaya dan akuntansi biaya

- Fokus makalah ini, *Accounting Financial Ratio.*

- Bukan liputan makalah ini, *Hybrid Ratio*, Nisbah hibrida, menggunakan (1) LK sebagai bahan baku analisis dan (2) bahan di luar LK sebagai bahan baku analisis.

  1. Bahan baku keuangan dan bahan baku analisis bukan keuangan, terdapat pada *Management Accounting,* misalnya, Kenaikan Tarif Imbalan Kerja Berbasis Kinerja (dalam satuan kinerja dan satuan mata uang) banding kenaikan Kinerja (dalam satuan kuantitas dan kualitas hasil kerja) pada suatu tahun fiskal pada sebuah negara.

  2. Bahan baku LK dan bahan baku analisis bukan LK. Bahan baku analisis menggunakan LK dan sumber bukan LK, misalnya Pendapatan Pungutan Tambat Perahu Pemda XYZ (bila informasi terdapat pada LK Pemda) banding Jumlah Nelayan (bila informasi tidak tersedia pada LK Pemda).

II.4. Pemilihan bahan baku untuk analisis

- Sebagai bahan baku, di gunakan sebuah LK tahun akuntansi tertentu, LK Auditan tersebut wajib beropini WTP.

- Bahan baku ideal berupa LK Auditan berstatus WTP tersebut di atas, namun analisis LK dapat menggunakan LK pra audit (*in-house Financial Statement, unaudited Financial Statement*) atau LK entitas yang belum pernah mengalami proses audit BPK. Karena itu, kualitas LK, identitas sumber dan kualitas sumber atau bahan baku analisis harus dinyatakan pada awal analisis.

Sebagi misal, analisis trend likuiditas akhir tahun buku A, akhir tahun buku B dan akhir tahun buku C tidak ideal dilakukan bila LK ber akhir tahun buku A mendapat opini audit WTP, sebaliknya LK ber akhir tahun buku B mendapat opini audit **bukan WTP**, sedang LK ber akhir tahun buku C mendapat opini audit WTP.

Pada LK Auditan beropini WDP, butir butir dikecualikan oleh auditor dalam lembar Opini Audit, tidak dapat digunakan sebagai bahan baku analisis LK. Sebagai misal, bila rumpun Pos Persediaan diperkecualikan, maka nisbah menggunakan Saldo Persediaan, Saldo Aset Lancar, dan Saldo Aset, tidak dapat dilaksanakan oleh analis.

- Sebagai rujukan baku, gunakan pula SAP versi PP 71/2010, berbagai tafsir PSAP *(Interpretasi)* dan berbagai Buletin Teknis pendukung SAP, dan berbagai terbitan resmi KSAP yang lain. Sebagai contoh, bila analis bermaksud menghitung nisbah aset lancar banding jumlah aset pada suatu akhir tahun buku, merujuk Lampiran I PSAP 01, Contoh Format Neraca pemerintah Pusat, lini (*row*) 20 tentang Jumlah Aset Lancar banding jumlah aset tertera pada lini *(row)* 54 tentang Jumlah Aset. Tampilan hasil perbandingan tsersebut, berarti lini 20 dibagi lini 54 tersebut.

Untuk keperluan makalah ini, dalam dunia akuntansi dan LK, nisbah keuangan atau *financial ratio* merupakan sebuah teknik akbar dalam analisis Laporan Keuangan, terdiri atas *common-size ratios*, *trend ratios* dan *individual ratio analysis*.

Teknik *common-size analysis dan trend Analysis* dapat tumpang tindih dengan Ratio Analysis. Misalnya *Common Size* menghitung Jumlah Utang pada Neraca dibagi Jumlah Ektuitas pada Neraca yang sama, pada Ratio Analysis disebut *Debt to Equity Ratio (DER).*

Contoh lain, dan sebaliknya, karena *common size* secara dilakukan hanya secara vertikal, sehingga analisis tak mungkin menghasilkan nisbah likuiditas atau *Current Ratio, Accid Test Ratio, Quick Ratio,* dan *Cash Ratio pada Ratio Analysis,* apalagi memasukkan unsur Beta pada rasio tekanan keuangan atau bahkan risiko kebangkrutan versi *Altman Z-Score.*

Ratio adalah sebuah **nisbah** atau **perbandingan** dua hal atau lebih, dan dari perbandingan tersebut didapatlah pemahaman yang lebih baik dan/atau lebih mendalam tentang berbagai hal yang ingin diketahui analis Laporan Keuangan.

Analisis Laporan Keuangan menggunakan LK sebagai dasar analisis, analis tidak menggunakan informasi lain di luar LK. Sebagai misal, pertumbuhan GDP dan *Income* Percapita, jumlah penduduk, luas pemda bukan hasil proses akuntansi berbasis SAP yang bermuara pada sebuah LK Auditan beropini WTP, karena itu bukan unsur sah LK Pemerintahan dan bukan bahan baku analisis LK.

Berbagai PSAP boleh jadi memberi ilustrasi atau contoh komponen neraca berupa pos-pos, aset, pos-pos utang atau liabilitas dan pos-pos dalam rumpun ekuitas. Pos tersebut dapat diharapkan tampil pada berbagai neraca pemerintahan, sehingga pos tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis nisbah.

Sama saja, contoh Laporan Operasional, LRA, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada SAP menggambarkan pos-pos yang kemungkinan besar terdapat pada setiap komponen LK tersebut, sehinga analisis pos tertentu dapat dicadangkan sebagai butir-butir yang akan dianalisis.

Selanjutnya, analisis LK dibahas dengan berbagai teknik atau hampiran sebagai berikut:

- *Common Size, Vertical Analysis*

    1. *Balance Sheet Analysis*
    2. *Surplus Deficit Aanalysis*
    3. *Budget Realization Analysis*
    4. *Cashflow Analysis*

- *Trend Analysis, Horizontal Analysis*

    1. *Balance Sheet Analysis*
    2. *Surplus Deficit Aanalysis*
    3. *Budget Realization Analysis*
    4. *Cashflow Analysis*

- *Speisific Ratio Analysis*

    1. Berbagai nisbah analisis vertikal unggulan
    2. Berbagai nisbah analisis horizontal unggulan
    3. Berbagai nisbah khusus

III. ANALISIS LRA BERHAMPIRAN *COMMON SIZE*

GASB 34 mengutamakan *common-size analysis*. Menurut GASB 34, kondisi ekonomi pemerintah terkait LRA adalah :

- Kondisi ekonomi pemerintah adalah gabungan (1) kesehatan keuangan pemerintah dengan (2) kemampuan & kemauan untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan (3) komitmen layanan publik.
- Kondisi ekonomi pemerintahan mencakupi tiga komponen yaitu (1) posisi keuangan, (2) kapasitas fiskal dan (3) kapasitas layanan.

- Kondisi keuangan pemerintah adalah status/kondisi (1) aset pemerintah, (2) liabilitas pemerintah, dan (3) aset neto atau ekuitas pemerintah, biasanya tertayang pada neraca pemerintah.

- Kapasitas fiskal adalah kemampuan & kemauan pemerintah untuk (1) menghasilkan pendapatan, (2) meminjam (berutang), dan kemauan/kemampuan (3) memenuhi kewajiban keuangan pemerintah yang jatuh tempo.

- Kapasitas layanan pemerintah adalah (1) kemampuan sumber daya fisik dan (2) kemauan memberikan/menyerahkan berbagai jenis sumber daya, termasuk SDM untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi atau komitmen layanan publik.

Menurut GASB 34, aspek aspek kondisi ekonomi pemerintahan mencakupi :

- Surplus atau defisit pada LRA dan LO.

- Pendapatan dan sumber pendapatan LRA/ LO.

- Beban LO/belanjaLRA, dan tekanan pengeluaran *(expenditure)*.

- Utang atau kewajiban, dan kemampuan membayar utang atau membereskan kewajiban.

- Kondisi keuangan dan manajemen perbendaharaan untuk penanganan program pensiun PNS dan imbalan lain paska-kerja PNS.

- Kondisi Likuiditas .

Selanjutnya, GASB 34 menjelaskan tentang Laporan Sumber dan Penggunaan Dana sebagai berikut :

- Laporan dibagi berdasarkan rumpun pemerintahan dan rumpun aktivitas berciri bisnis.

- Laporan dibagi berdasarkan rumpun sumber dana, perjenis sumber dana misalnya (1) dana umum (*General Fund*), (2) dana jalan raya, (3) dana pembangunan ekonomi, (4) dana pembangunan sekolah, dan (5 dst) berbagai jenis dana lain, yang berbentuk (1) kas, setara kas dan (2) (investasi) dana ekonomi, (3) dana pembangunan sekolah dan (4) dana pemerintahan yang lain)).

Penjelasan tentang pelaporan anggaran dalam GASB 34 adalah sebagai berikut :

- Perbandingan antar *anggaran perjenis dana* tidak dibutuhkan
- Perbandingan anggaran vs realisasi anggaran untuk Dana Umum dan Dana pendapatan terbesar, diwajibkan.

- Perbandingan anggaran dan realisasi disarankan sebagai informasi suplemen wajib, dapat pula disajikan sebagai komponen resmi LK.

- Pendapatan/penghasilan program disandingkan dengan beban program.

- Penghasilan/pendapatan program yang lebih besar dari biaya/beban program ditandai secara khusus sebagai bagian kontribusi pendapatan Negara.

- Pendapatan transfer dilaporkan secara khusus.

- Setiap jenis Dana (*Fund*) dilaporkan dalam kolom khusus.

- Format LRA sesuai dengan SAP.

- Penyimpangan realisasi terhadap anggaran disajikan dalam kolom khusus, dijelaskan dibawah tabel perbandingan APBN/D vs realisasi, dan/atau pada CALK.

- Anggaran dan perubahan anggaran harus dilaporkan pada kolom terpisah, alasan perubahan dijelaskan.

- Hubungan informasi anggaran dengan laporan keuangan dijelaskan, terutama perbedaan karena basis anggaran adalah basis kas, sementara komponen LK selebihnya berbasis akrual.

- Laporan realisasi anggaran umumnya, penyimpangan realisasi khususnya digunakan untuk penyusunan asumsi dasar anggaran dan prediksi masa depan.

- Pertimbangan umum analisis nisbah (*ratio analyses*) adalah sebagai berikut :

    1. Analisis tidak dibatasi hanya analisis nisbah, metode analisis lain diperkenankan

2. Terdapat bebagai jenis nisbah yang menggambarkan sebuah entitas kepemerintahan, misalnya aset neto dibagi biaya entitas, atau aset neto dibagi pendapatan entitas tersebut.

3. Laporan ekuitas dan perubahan ekuitas menggabungkan berbagai analisis parsial, misalnya analisis efektivitas sebuah dana, analisis kinerja BUMN terlepas dari pemerintahan, atau analisis aset terpasung (*restricted asset*).

4. Jumlah pendapatan LRA = pendapatan program + pendapatan umum.

5. Analis dapat mengeluarkan pos-pos khusus, pos-pos luar biasa, pos-pos tidak lazim dan transfer dari proses analisa.

6. Apabila dalam LK terdapat informasi belanja langsung dan tidak langsung, biaya/beban langsung atau tidak langsung, analis dapat pula menggunakan informasi tersebut dalam analisisnya.

7. Analis selalu melihat lini paling bawah (*bottom line*) dari tabel apapun untuk mendapatkan gambaran akhir dan keseluruhan, kemudian lihatlah angka-angka diatasnya dan temukan lini (*row*) yang paling berpengaruh pada hasil akhir tersebut (*bottom line*).

Menurut GASB 34, aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar kapasitas fiskal, adalah sebagai berikut :

- Apakah pemerintah mempunyai kemampuan membiayai kebutuhan layanan publik di masa depan.

- Nisbah utang per 100 USD untuk nilai properti.

- Nisbah utang per 100 USD untuk nilai properti = (jumlah liabilitas X 100) dibagi (nilai properti (yang terpilih untuk dinilai)).

- Utang perkapita.

- Utang perkapita = jumlah liabilitas dibagi populasi.

- Pendapatan PBB per 100 USD nilai *asessment* properti.

- Pendapatan PBB per 100 USD nilai *assessment* properti = (pendapatan PBB X 100) dibagi (nilai *asessment* properti).

- Utang per1000 USD penghasilan pribadi penduduk (*personal income*).

- Pendapatan PPN dibagi jumlah volume perdagangan.

- Pendapatan PPH dibagi jumlah pendapatan nasional atau PDB.

Sepuluh Kementerian ber-APBN terbesar adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Dikti, Kemendikbud, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian.

Selaras Penjelasan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang 17 tahun 2003 yang menyatakan; bahwa tugas LRA selain menyajikan informasi pendapatan dan belanja, LRA juga wajib menjelaskan **prestasi kerja** kementerian negara, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah dan badan lainnya**.**

Analisis berhampiran *Common Size* bagi LRA (saja) mencakupi :

III.1. Realisasi sebuah pos anggaran banding anggaran pos tersebut

- Nisbah terpenting, makin rendah makin buruk untuk anggaran pendapatan, makin tinggi makin buruk untuk anggaran belanja, tidak dapat melebihi 100%, inilah inti pertanggungjawaban penggunaan APBN/D.
- Nisbah untuk menengarai realisasi yang tak mencapai anggaran dan penjelasan sebabnya pada CALK, pada suatu akhir periode akuntansi**.** Analisis sebab kegagalan penyerapan anggaran adalah utama.

Penjelasan tentang pelaporan anggaran dalam GASB 34 adalah sbb :

- Perbandingan anggaran dan realisasi disarankan sebagai informasi suplemen wajib, dapat pula disajikan sebagai komponen resmi LK
- Penyimpangan realisasi terhadap anggaran disajikan dalam kolom khusus, dijelaskan dibawah tabel perbandingan APBN/D vs realisasi, dan/atau pada CALK.

- Laporan realisasi anggaran umumnya, penyimpangan realisasi khususnya digunakan untuk penyusunan asumsi dasar anggaran dan prediksi masa depan.

- Jumlah pendapatan LRA = pendapatan program + pendapatan umum.

- Apabila dalam LK terdapat informasi belanja langsung dan tidak langsung, biaya/beban langsung atau tidak langsung, analis dapat pula menggunakan informasi tersebut dalam analisisnya.

- Analis selalu melihat lini paling bawah (*bottom line*) dari tabel apapun untuk mendapatkan gambaran akhir dan keseluruhan, kemudian lihatlah angka-angka diatasnya dan temukan lini (*row*) yang paling berpengaruh pada hasil akhir tersebut (*bottom line*).

- Apakah pemerintah mempunyai kemampuan membiayai kebutuhan layanan publik di masa depan

III.2. Persentase Anggaran Belanja Modal banding Jumlah Belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Nisbah perencanaan strategis dan realisasi strategis bila untuk pembangunan fasos-fasum pemerintahan mengutamakan rakyatnya, makin tinggi nisbah atau mendekati 100%, mengindikasikan makin tinggi kinerja entitas. Nisbah menunjukkan upaya penghematan atau penurunan belanja pegawai dan belanja barang, mungkin menunjukkan struktur organisasi entitas di jaga tetap ramping, efektif dan efisien.

Belanja modal adalah pengeluaran untuk menambah aset tetap untuk tupoksi atau investasi wajib sesuai amar UU. Belanja modal mencakupi harga beli atau harga perolehan nan-ekonomis, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya langsung lain sampai aset tetap siap digunakan. Belanja modal dapat pula berupa belanja modal bahan baku mesin dan peralatan (532112) dan bahan baku gedung atau bangunan (533112) sebagai Aset KDP dan AT Dibangun Sendiri. Proporsi ATB menggambarkan tingkat kecerdasan dan kecanggihan kepemerintahan negara seluas Eropa. Pada era milenium, AI dan era robotik, kenaikan nisbah adalah menggambarkan kemampuan operasional modern sesuai zaman, dari tiap entitas kepemerintahan.

Kenaikan nisbah ini dan kenaikan belanja perangkat lunak dan perangkat keras multi-media adalah berita baik, transaksi keuangan cq belanja negara manapun makin berbasis *online* berbasis GCG, karena transaksi berbasis uang tunai rentan KKN dan sulit di audit BPK dan KPK. Contoh lain pembangunan ATB adalah digitalisasi sekitar 200 desa Kabupaten Banyuwangi, merupakan kenaikan nisbah ATB strategis. AT KDP menggambarkan dinamika pembangunan kepemerintahan modern, mengganti bangunan, fasos dan fasum yang telah uzur.

Analis LK memerhatikan kelayakan penggantian fasilitas tua, alih-alih strategi pemugaran, renovasi dan upaya revaluasi AT yang kurang bijak.

KDP strategis dengan cetak biru berdurasi 25 tahun sampai 50 tahun berbasis relokasi ke kawasan baru kepemerintahan yang terpisah dari hunian dan kegiatan perekonomian adalah ideal, seperti dilakukan oleh Australia, Malaysia dan berbagai negara lain. Makin besar nisbah KDP makin baik masa depan entitas LK.

Sebagai misal, Analis membahas :

Apakah besar relatif (nisbah) tersebut wajar atau sehat sesuai tupoksi K/L, Pemda atau Desa. Sebagai misal, Otoritas Batam, Dephan atau Departemen PU mempunyai proporsi Aset Lancar terlampau besar dibanding proporsi jenis aset alat berat untuk pelaksanaan tupoksi utama. Jangan-jangan kebutuhan sarana-alat-berat tidak

memadai, proporsi kepemilikan aset tetap mungkin kurang sehat, ditandai anggaran sewa alat berat menggunakan aset-lancar atau pos kas untuk belanja sewa alat berat yang memboroskan APBN/D.

Apakah benar dan sehat untuk Kementerian PU, Aset Tetap lebih besar dari Aset Lancar.

Jelajah maya Departmen PU pemerintahan negara lain, melihat proporsi aset-lancar pada berbagai Departemen yang serupa tersebut. Dapatkan gagasan kesehatan global struktur aset lancar pada Departemen PU. Lakukan studi banding.

Analisis kenaikan proporsi Aset-Lancar diiringi penurunan proporsional aset tetap untuk tupoksi utama Departemen PU, mungkin menunjukkan gejala kondisi keuangan cq Neraca Kementerian PU menjadi lebih sehat atau kurang sehat.

Sebagai catatan bagi analis LK, sebaliknya terdapat beberapa Departemen lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa yang mungkin membutuhkan aset-lancar lebih dari PU. Kementerian Koordinator seharusnya memiliki AL dan AT minimum, bersifat non-operasional bagi Tupoksi, sesuai tugas koordinasi saja.

Analis membuat analisis mengapa aset lancar Kementerian PU meningkat pada suatu tahun anggaran tertentu, menyebabkan CA/TA Ratio tersebut meningkat, padahal tak ada bukti nmeyakinkan tentang kebutuhan peningkatan CA?

Sebagai misal, Analis menenggarai hal hal sebagai berikut pada CALK :

- Terjadi kerusakan nasional fasos-fasum pada tahun badai, banjir dan gempa bumi, sehingga belanja barang PU untuk besi beton, semen, aspal dan lain-lain amat meningkat.

- Terjadi kenaikan umum harga-harga bahan bangunan, sehingga Belanja Barang dalam kuantitas tetap berdampak kenaikan APBN Belanja Barang PU dalam satuan moneter.

- Terjadi longsor berulang karena struktur dan sifat tanah sepanjang Tol Cipularang dan beberapa provinsi lain.

- Ambisi RI I untuk membangun sarana Tol-Laut Dan Tol dara NKRI, kunjungan kerja Presiden menghasilkan gagasan secara tiba-tiba membangun jalan akses kepada suaru remote area di Papua dan desa-desa terpencil lain, menyebabkan logistik PU membengkak.

- Bahwa kegiatan Revaluasi BMN dan pengetahuan baru tentang masa-guna sejati berbagai fasos-fasum uzur dan berumur melebihi nilai ekonomi, sosial

dan teknik, membutuhkan dana renovasi berbentuk subkontrak atau belanja barang PU dalam jumlah amat besar.

GASB 34 menjelaskan tentang Laporan Sumber dan Penggunaan Dana , antara lain kewajiban rincian penjelasan sebagai berikut :

- Dana jalan raya.
- Dana pembangunan ekonomi.
- Dana pembangunan sekolah.
- Hubungan informasi anggaran tentang belanja modal dengan perubahan AT & ATB pada laporan keuangan dijelaskan, terutama perbedaan karena basis anggaran adalah basis kas, sementara komponen LK selebihnya berbasis

III.3. Persentase Anggaran Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Pegawai banding seluruh Jumlah Belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Terkait program digitalisasi fungsi perbendaharaan, program percepatan pensiun PNS dan perekrutan PNS generasi milenia berbasis IT, APBN/D makin tertandai oleh jumlah SDM mengecil, dan skala upah dan gaji membesar.

Belanja Pegawai terkait budaya gemar-rekrut berisiko pembengkakan SDM PNS, berisiko menyimpang dari tujuan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana operasi utama nan efektif & efisien sesuai tupoksi K/L atau pemda tersebut.

Analis mewaspadai ketidak-sadaran akan risiko pembengkakan organisasi dan kenaikan Belanja Pegawai bermotif pemanjaan diri sendiri.

Analis mengamati kecenderungan dominasi Belanja Pegawai tak bernilai tambah, berkonotasi kurang sehat dan efisien.

Makin kecil Belanja Pegawai dan Barang untuk sukses pelaksanaan tupoksi, makin tinggi efektivitas dan efisiensi organisasi entitas LK tersebut, sehingga memungkinkan terjadi perbesaran alokasi Belanja Modal cq fasos-fasum. Bentuk pemerataan terbaik adalah fasos-fasum yang dapat dinikmati adil setara oleh penduduk kaya maupun miskin. Tertengarai belum ada penyelenggaraan kontes atau kejuaraan tahunan tentang sukses Reformasi Belanja Pegawai, melanjutkan era perolehan opini WTP atas LK.

Menurut GASB 34, analisis aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar kapasitas fiskal, harus menjawab ; Apakah pemerintah mempunyai kemampuan membiayai kebutuhan layanan publik di masa depan ?

III.4. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Barang terhadap seluruh Jumlah Belanja

Belanja barang operasional lebih baik dari belanja barang non operasional. Belanja barang jangan meniru belanja tahun lalu (ditambah besaran inflasi dan pertumbuhan organisasi), sebaiknya dianggarkan secara lebih kreatif, mungkin dengan hampiran *Zero Based Budgeting.* Tertengarai belum ada penyelenggaraan kontes atau kejuaraan tahunan tentang sukses Reformasi Belanja Barang, melanjutkan era perolehan opini WTP atas LK.

Belanja jasa dilakukan hanya apabila entitas tidak sanggup melaksanakan sendiri kegiatan tersebut. Belanja pemeliharaan terkait kepada kondisi fisik aset pemerintah, makin banyak AT, makin besar biaya pemeliharaan dan peremajaan AT.

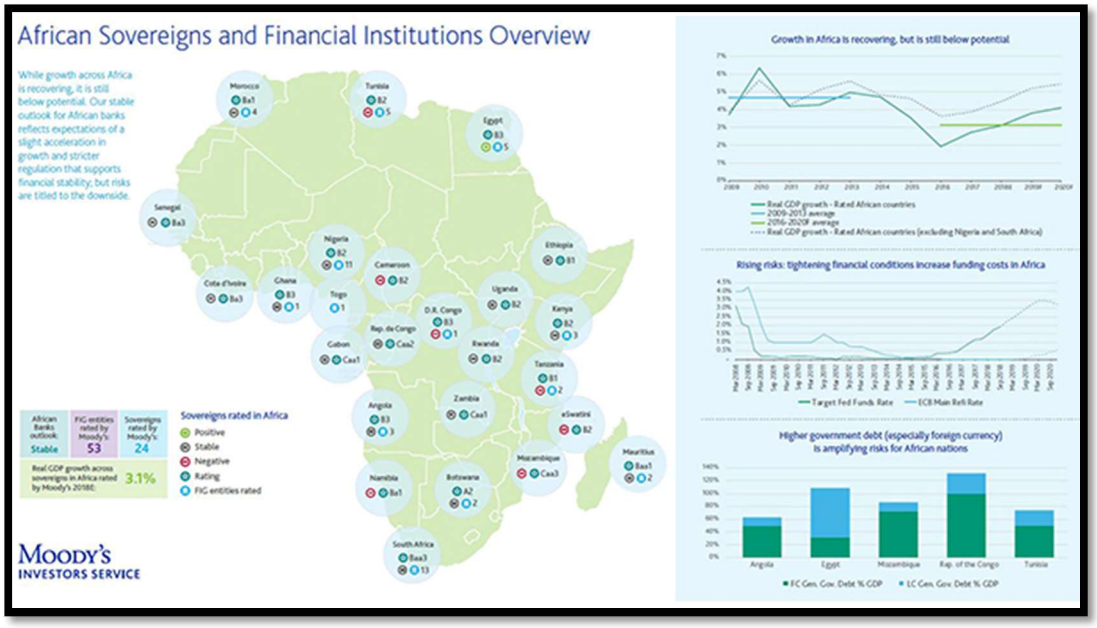

Pada wilayah multi-media dan transaksi maya, perjalanan dinas seharusnya berkurang. Belanja Operasi cq perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan dengan rencana perjalanan dinas, analisis ber-maslahat perjalanan dinas, misalnya studi-banding, dan bukti transaksi perjalanan dinas.

Belanja barang berbentuk honoratium harus berdasarkan peraturan yang berlaku penggantian inventaris kantor dibawah nilai kapitalisasi sesuai peraturan yang berlaku tentang pengadaan bahan makanan pakaian seragam dinas berdasar peraturan internal.

Belanja jasa listrik, telepon, kas, air, pos dan giro, jasa konsultan, sewa, dan jasa lain sesuai ketentuan internal pemerintahan.

Belanja pemeliharaan mencakupi pemeliharaan aset tetap dan aset tetap tidak berwujud, biaya reparasi kerusakan aset tersebut.

Belanja perjalanan dinas terbagi menjadi belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan tetap, dan belanja perjalanan lain.
Analis dapat meneliti rincian tersebut dalam catatan akuntansi.

Tertengarai terjadi berbagai rapat koordinasi lintas kementerian oleh Kemenko Perekonomian menjelang akhir 2018 untuk kelancaran emisi Perpres SAP Desa tahun 2019, dan makalah ini mengantisipasi munculnya era baru NKRI berbasis LK Desa.

Rencana Perpres 2019 tentang LK Desa berbasis SAP Desa cq LRA Desa akan meningkatkan daya ungkit perekonomian-berbasis-pertanian. Program Padat Karya Desa 2019 cq Program Swakarsa dan Swakelola Desa, dan Program Nasional Pembangunan Produk/Jasa Unggulan Tiap Desa, terfokus pada Permendes Prioritas 2019 tentang akselerasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penghapusan kemiskinan di desa, peningkatan kualitas hidup desa dan akselerasi pemupukan aset produktif desa. Akuntabilitas teraudit BPK atas LK Desa akan menjadi dasar alokasi Dana Desa tidak proporsional, namun berbasis (1) suatu basis alokasi yang mempunyai dampak-berantai (*multiplier effects*) dan (2) manajemen KKN Desa, ribuan kepala desa terjaring OTT KPK, *markup* berbagai belanja desa, pemborosan, salah guna SPBDes, dan (2) pengutamaan 17.000 desa tertinggal. Strategi pembangunan ekonomi kewilayahan, bantuan Provinsi & APBD Pemda, serta RAPBDes akan lebih berdasar kondisi aset yang termaktub pada LK Desa, misalnya fasilitas jalan desa, sistem irigasi dan sarana embung dan penampungan air bersih lain, serta MCK yang masih jauh dari memadai.

Wajah Indonesia adalah bandara, tol, kota besar modern, sedang jati diri NKRI adalah 74.000 desa. Dewasa ini Indonesia sadar dan kembali ke khitah, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI, Kabinet peduli 17.000 pulau mengalirkan APBN pembangunan tol laut, darat dan udara, dan mengalirkan Dana Desa sampai dengan 2018 mencapai mencapai Rp 187 Triliun (Presiden menetapkan target rata-rata alokasi Dana Desa Rp.2 Miliar per desa, berarti Rp.150 Triliun per tahun anggaran untuk 74.000 desa), lumayan berhasil mencipta 123.145 Km jalan desa, 5.220 Pasar Desa, 26.070 BUM Desa, 1.927 unit Embung Tampungan Air Desa, 28.091 unit Irigasi Desa, 37.496 Sarana Air bersih, 5.314 Polindes, 18.072 PAUD, 108.072 MCK, 38.217 Drainase dan 65.918 Penahan Tanah Desa, secara ideal seharusnya tampak pada tiap LK Desa cq Neraca 74.000 Desa ter-audit BPK.

Penjelasan tentang pelaporan anggaran terkait Belanja Barang , dalam GASB 34 adalah sebagai berikut :

- Perbandingan anggaran vs realisasi anggaran untuk Dana Umum dan Dana pendapatan terbesar, diwajibkan.
- Perbandingan anggaran dan realisasi disarankan sebagai informasi suplemen wajib, dapat pula disajikan sebagai komponen resmi LK.

- Pendapatan/penghasilan program disandingkan dengan beban program.

- Penghasilan/pendapatan program yang lebih besar dari biaya/beban program ditandai secara khusus sebagai bagian kontribusi pendapatan Negara.

- Pendapatan transfer dilaporkan secara khusus.

- Penyimpangan realisasi terhadap anggaran disajikan dalam kolom khusus, dijelaskan dibawah tabel perbandingan APBN/D vs realisasi, dan/atau pada CALK.

- Anggaran dan perubahan anggaran, misalnya perubahan APBN Dana Desa 2019, harus dilaporkan pada kolom terpisah, alasan perubahan dijelaskan.

- Hubungan informasi anggaran dengan laporan keuangan dijelaskan, terutama perbedaan karena basis anggaran adalah basis kas, sementara komponen LK selebihnya berbasis akrual, misalnya aliran Dana Desa muncul sebagai aset desa di Neraca Desa.

- Laporan realisasi anggaran umumnya, penyimpangan realisasi khususnya digunakan untuk penyusunan asumsi dasar anggaran dan prediksi masa depan. Misalnya, realisasi APBN Dana Desa yang menemukan hambatan penyerapan APBN.

- Apabila dalam LK terdapat informasi belanja langsung dan tidak langsung, biaya/beban langsung atau tidak langsung, analis dapat pula menggunakan informasi tersebut dalam analisisnya.

- Analis selalu melihat lini paling bawah (*bottom line*) dari tabel apapun untuk mendapatkan gambaran akhir dan keseluruhan, kemudian lihatlah angka-angka diatasnya dan temukan lini (*row*) yang paling berpengaruh pada hasil akhir tersebut (*bottom line*).

- Apakah pemerintah mempunyai kapasitas fiskal cq kemampuan membiayai kebutuhan belanja barang untuk layanan publik di masa depan.

III.5. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Bunga terhadap seluruh jumlah belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Makin besar utang berbunga, makin besar biaya bunga. Makin besar nisbah makin buruk kinerja keuangan kepemerintahan tersebut, karena itu nisbah belanja bunga diupayakan minimum atau nihil.

Belanja bunga meliputi tagihan bunga atas utang, denda, provisi, biaya administrasi dan biaya komitmen.

GASB 34 meminta penjelasan

- Beban Bunga LO/belanja Bunga LRA, dan tekanan pengeluaran *(expenditure)* belanja bunga.

- Utang atau kewajiban, dan kemampuan membayar utang atau membereskan kewajiban.

- Kondisi Likuiditas.

- Perbandingan anggaran dan realisasi disarankan sebagai informasi suplemen wajib, dapat pula disajikan sebagai komponen resmi LK.

- Penyimpangan realisasi terhadap anggaran disajikan dalam kolom khusus, dijelaskan dibawah tabel perbandingan APBN/D vs realisasi, dan/atau pada CALK.

- Hubungan informasi anggaran dengan laporan keuangan dijelaskan, terutama perbedaan karena basis anggaran belanja bunga adalah basis kas, sementara utang bunga (Neraca) atau beban bunga (LO) pada komponen LK selebihnya berbasis akrual.

- Laporan realisasi anggaran Belanja bunga umumnya, penyimpangan realisasi khususnya digunakan untuk penyusunan asumsi dasar anggaran dan prediksi masa depan.

- Apabila dalam LK terdapat informasi belanja langsung dan tidak langsung, biaya/beban langsung atau tidak langsung, analis dapat pula menggunakan informasi tersebut dalam analisisnya.

- Utang perkapita
  Utang perkapita = jumlah liabilitas dibagi populasi.

III.6. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Subsidi terhadap jumlah seluruh belanja, pada suatu akhir periode akuntansi

Ilmu ekonomi subsidi menjadi dasar kebijakan subsidi. Nisbah terpenting, berbagai subsidi berdampak akselerasi pembangunan sektoral misalnya UKM sektor riil dan pemerataan kemakmuran bagi penduduk miskin adalah baik. Berbagai kebijakan subsidi berdampak buruk pada pembangunan sikap-mental mandiri dan etos-kerja, perlu dihindari.

Pemerintah memberi subsidi bagi beberapa perusahaan Negara atau BUMN misalnya subsidi PLN, ditambah subsidi kelompok miskin berupa subsidi energi dan subsidi

non energi seperti subsidi listrik, BBM, pupuk, air minum, BPJS, kesehatan, produsen, dan subsidi UMKM.

Subsidi pendidikan yang mencakupi berbagai program antara lain Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, dan Beasiswa Bidik Misi.

III.7. Persentase Belanja Operasi Tertentu cq Belanja Bantuan Sosial terhadap seluruh belanja, pada suatu akhir periode akuntansi

Nisbah terpenting; bila bersasaran tepat dan teralokasi sehat, makin besar nisbah makin baik.

Belanja bantuan sosial antara lain terdiri atas tunjangan kesehatan janda/duda dan putra putri pahlawan tidak mampu ekonomi, tunjangan pendidikan atau beasiswa masyarakat miskin, bantuan sembako bencana alam, yatim piatu dan tuna sosial, perawatan kesehatan, obat-obatan, penyediaan pemakaman, penyuluhan penyakit menular bagi masyarakat tidak mampu, lembaga dan yayasan sosial.

III.8. Persentase belanja menurut fungsi terhadap seluruh belanja pada tahun yang sama, antara lain:

III.8.1. Belanja Perlindungan Sosial terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Nisbah terpenting, sepanjang terarah dan tepat sasaran, makin besar makin baik, sampai suatu hari NKRI mencapai cita cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk aspek pertanggungjawaban, KSAP membentuk produk standar akuntansi Dana Bergulir, BLU, TGR, Bantuan Sosial dan Hibah.

Belanja perlindungan sosial mencakupi Dana Desa, Subsidi, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik Misi, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendanaan kegiatan usaha rakyat, Program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (PRAPS), dan program sertifikat tanah untuk rakyat

Rencana alokasi Dana Desa Rp.120 T tahun 2019 dibatalkan, menjadi sekitar Rp.75 T untuk tahun APBN 2019, sangat mungkin karena kegamangan pemerintah antara lain karena Standar Akuntansi Desa belum diterbitkan, belum ada audit LK Desa dan BUM Desa oleh BPK, terlampau banyak kasus OTT Kepala Desa oleh KPK dan berbagai salah-guna atau kebocoran Dana Desa, berbagai pendirian PT Mitra BUMDesa oleh pemerintah pusat dan pemda belum berfungsi optimal.

Siskeudes ciptaan BPKP & Depdagri mengalami sukses implementasi kepada hampir 100% Desa, dengan mudah dapat ditransformasi menjadi sistem akuntansi versi SAP Desa.

Menurut GASB 34, aspek keuangan dari kondisi ekonomi pemerintahan berdasar kapasitas fiskal, analis berupay a memperoleh jawabab ; Apakah pemerintah mempunyai kemampuan membiayai kebutuhan layanan pelindungan sosial di masa depan

III.8.2. Belanja Pelayanan Umum terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Belanja pelayanan umum untuk mencapai GSB melalui peningkatan kinerja kelembagaan dan birokrasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik berbasis *e-government*, implementasi SAKTI, dan manajemen K/L berbasis *output.*

III.9. Persentase Belanja Pendidikan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Nisbah terpenting bagi NKRI. Realisasi anggaran untuk belanja subfungsi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, mencakupi pendidikan umum dan pendidikan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, realisasi sesuai target RPJM untuk bantuan beasiswa, penurunan jumlah penduduk buta aksara, pertumbuhan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), perlindungan dan pelayanan sosial anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, bantuan/jaminan sosial, litbang perlindungan sosial dan perlindungan sosial lain, peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan indek pemberdayaan gender (IPG).

Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) seluruh K/L dan pemerintah daerah provinsi (dengan dukungan dana dekonsentrasi), program penurunan tindak pidana perdagangan orang, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, dan peningkatan sistem peradilan pidana anak (SPPA).

Minimum 20% APBN/D teralokasi sebagai anggaran pendidikan, antara lain untuk beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu (Bidik Misi), bantuan siswa miskin (realokasi subsidi BBM), sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

APBN pendidikan disusun berdasar harga BBM (Premium). Anggaran pendidikan terutama digunakan untuk imbalan gaji pendidik, menyusul etos pendidikan negara Jepang, tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. APBN pendidikan dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Sebagai misal, penduduk miskin sekitar 30 juta penduduk, membutuhkan membutuhkan bantuan Bidik Misi cq Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Analis mengevaluasi efektivitas dan efisiensi belanja pendidikan yang teralokasi sebagai gaji pegawai, modal, belanja barang dan jasa, dan segala upaya untuk menghindari risiko realisasi belanja pendidikan tidak mencapai 20% APBN/D

Sesungguhnya sistem klasifikasi belanja langsung pendidikan dan belanja tidak langsung pendidikan sempat memberi manfaat pada sistem anggaran daerah, terutama untuk mencegah perpindahan belanja langsung menjadi belanja tidak langsung, menyebabkan peningkatan belanja pegawai dari tahun ketahun dan penurunan belanja modal, barang dan jasa.

III.10. Persentase Belanja Pertahanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Nisbah terpenting bagi kedaulatan NKRI. Belanja fungsi pertahanan mencakupi belanja pertahanan Negara, belanja dukungan pertahanan dan belanja LitBang pertahanan.

APBN Pertahanan dibagi proporsional kepada 3 matra di TNI, antara lain berupa :

1. Penambahan SDM TNI wilayah Indonesia Timur,

2. Pembangunan pangkalan militer satuan baru.

APBN pertahanan terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dijabarkan menurut unit organisasi dan program Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Bagi negara seluas Eropa, kedaulatan NKRI dijamin oleh TNI berkapasitas memadai. Pada umumnya, penjagaan perbatasan negara dan 17.000 pulau adalah utama. Perbandingan kekuatan militer antar negara secara sederhana makin diproksi oleh jumlah kepemilikan dan kualitas AT *bomber*, *jet-fighter* (terutama kepemilikan rumpun F15, F16, F22 dan F36) kuantitas dan kualitas aset satelit & GPS militer, patroli udara oleh AWACS dan/atau Drone berfungsi bomber, serta ASBM & ICBM, jumlah dan kualitas kapal induk, kapal selam ber SSBM sampai jumlah & kualitas fregat anti-pencurian ikan, sarana modern AD, dan kecukupan logistik perang-bintang berbasis AI dan robotik.

Nisbah dan kecukupan kualitas/kuantitas AT POLRI diyakini cukup untuk tupoksi POLRI, mobilitas POLRI dan kemampuan manuver, terutama untuk tugas keamanan dalam negeri.

Nisbah meningkat adalah kabar baik, nisbah tersebut sejalan dengan (1) belanja pegawai hankam (dengan perekrutan anggota TNI bergelar sarjana teknik) untuk operasi berbasis penginderaan-jauh dan AI, dan (2) pembangunan sarana Pangkowilhan.

Peningkatan nisbah ditandai pula peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan sarana keamanan.

III.11. Persentase Belanja Ketertiban & Keamanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Negara Kesatuan menghadapi perpecahan bila mata anggaran APBN tak memadai untuk negara seluas Eropa. APBN Ketertiban keamanan digunakan untuk penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan Negara, ketertiban umum antara lain;

Separatisme, politik *devide et impera* kekuatan asing, kudeta dan upaya penggantian konstitusi, terorisme dan tindak pidana lintas Negara, tindak pidana umum, pengamanan kegiatan khusus seperti Asian Games, sidang IMF dan WB, pemilu, pilkada, unjuk rasa, pemberdayaan masyarakat cq pembentukan desa tangguh bencana.

Subfungsi belanja fungsi ketertiban dan keamanan adalah subfungsi kepolisian, penganggulangan bencana, pembinaan hukum, peradilan, litbang ketertiban dan keamanan, dan sub fungsi lain-lain.

Sub fungsi kepolisian mendominasi rumpun belanja ini dengan pertumbuhan tertinggi untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian, sarana dan prasarana kepolisian, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, pencegahan/pemberantasan separatisme, penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba.

Sub fungsi penanggulangan bencana terdiri atas program pengurangan risiko bencana, pencarian dan penyelamatan.

Ukuran sukses realisasi anggaran adalah penurunan angka pelanggaran hukum, indeks kriminalitas, kudeta, tindak separatisme dan terorisme, terciptanya suasana aman tertib, kondusif dalam masyarakat, meningkatnya kesadaran hukum dan peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial & gangguan keamanan, penurunan gangguan keamanan pada moda transportasi laut dan darat, keamanan pesisir, pelabuhan nasional/internasional, penurunan angka salah-guna narkoba dan peredaran gelap narkoba, peningkatan GCG dan pelayanan kepolisian, penurunan tingkat dan jenis kejahatan konvensional dan transnasional yang berimplikasi kontijensi, serta kejahatan terhadap kekayaan Negara.

III.12. Persentase Belanja Ekonomi terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi yang sama

Makin besar nisbah, makin aman situasi perekonomian. Nisbah membesar tatkala negara mengatasi masalah krisis ekonomi.

III.13. Persentase Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Kerusakan ekosistem untuk sebuah negara seluas Eropa yang berlanjut antar kabinet menunjukkan belanja perlindungan lingkungan hidup belum tepat guna. Penggundulan hutan suatu kabinet belum dipulihkan kabinet selanjutnya, minimum sebagai HTI atau hutan sekunder. Dibutuhkan perbesaran APBN sampai ribuan persen (10 kali lipat) bagi pemulihan lingkungan, pada era kabinet yang akan datang dalam program minimum satu dasawarsa. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian-langsung oleh Presiden-yang lebih efektif untuk perlindungan ekosistem NKRI.

Anggaran bertujuan untuk penguatan instrumen pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, perizinan, perpajakan lingkungan hidup, regulasi ekosistem, strategi lingkungan pada tataran global, pembangunan/pemeliharaan demokrasi lingkungan, penguatan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana lingkungan hidup, penguatan kelembagaan, perlindungan/pengelolaan lingkungan hidup, penguatan SDM pemerintahan, terutama pejabat pengawas dan penyidik lingkungan hidup.

Anggaran bertujuan menahan kerusakan/kemerostan/ kepunahan keanekaragaman hayati, mengatasi/mencegah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan hunian, penurunan jumlah/kualitas SDA, meningkatkan kualitas alih fungsi lahan terutama hutan, peningkatan kesejahteraan lingkungan hidup bagi penduduk miskin, kesehatan dan keselamatan manusia, pengaturan izin usaha hijau dan pengawasan emisi limbah (AMDAL) dengan cita-cita ekonomi hijau lestari untuk peningkatan PDB dan penghasilan perkapita.

III.14. Persentase Belanja Perumahan dan Pemukiman terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Alokasi anggaran bagi kementerian PUBL dimaksud untuk pembangunan infrastuktur pendorong pertumbuhan, pemerataan dan keadilan ekonomi dalam bentuk jalan, jembatan, gedungan, perumahan, permukiman, jalur kereta, bandara, informasi dan telekomunikasi.

Anggaran dialokasikan untuk peningkatan konektivitas, ketahanan pangan dan air, permukiman dan perumahan, dengan sekitar 70% Belanja Modal terutama untuk konstruksi, peralatan, mesin dan pengadaan tanah. Peningkatan konektivitas berupa belanja pembangunan jalan baru termasuk jalan tol dan pemeliharaan jalan yang telah ada. Untuk ketahanan pangan dan air, terdapat alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan bendungan dan jaringan irigasi.

Pada sektor pemukiman, peningkatan layanan air minum nasional dengan pembangunan/pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan pengolahan air limbah, penyediaan perumahan berupa anggaran pembangunan rusun, rumah

swadaya, rumah khusus, bantuan prasarana dan mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Alokasi pembiayaan investasi berupa biaya penanaman modal Negara sebagai modal awal tabungan perumahan (Tapera) dan pembangunan BLU pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PLU-PPDP) terutama pembangunan pemukiman transmigrasi sepanjang tol laut, dara dan udara.

III.15. Persentase Belanja Kesehatan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Belanja fungsi kesehatan terdiri atas berbagai sub-fungsi obat, perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana, Litbang kesehatan dan sub fungsi lain, dengan tujuan perbaikan layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin (kesehatan misalnya imunisasi), mortalitas dan gizi anak, pengendalian penyakit menular, dan pembangunan SDM Kesehatan.

IIII.16.Persentase Belanja Pariwisata dan Budaya terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Potensi pariwisata negara seluas Eropa ini hampir tanpa batas, APBN pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur pariwisata jauh dari memadai. Gagasan tol darat, laut dan udara antara lain sebagai dasar ekonomi pariwisata dan ekonomi desa, belum disambut oleh APBN/D Pariwisata dan Dana Desa. Anggaran terdiri atas berbagai sub-fungsi pengembangan pariwisata (hampir 50%), pembinaan penerbitan dan penyiaran, Litbang pariwisata dan sub fungsi lain dengan ukuran sukses program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata, peningkatan wisata domestik dan wisatawan asing, peningkatan daya asing pariwisata NKRI pada tataran global, pengelolaan terpadu cagar budaya (misalnya rumpun candi dan situs), revitalisasi museum, sub-fungsi penelitian budaya dan arkeologi, pergelaran, pameran, festival, dan lomba.

III.17. Persentase Belanja Agama terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi

Anggaran mencakupi sub-fungsi peningkatan kehidupan beragama, program peningkatan kerukunan hidup beragama, pencegahan sara dan teror berbasis agama, program pencegahan perusakan tempat ibadah, LitBang agama dan pelayanan keagamaan lain-lain seperti bantuan pengurusan UU Gangguan & IMB bagi bangunan ibadah agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Budha, dengan ukuran

sukses tingkat kerukunan antar agama, jumlah/kualitas pembangunan tempat ibadah & kegiatan ritual agama didukung seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial, kualitas/kuantitas penyelenggaraan haji dan ziarah keagamaan, penyediaan dana setoran awal untuk sebsidi pemondokan, makanan dan kesehatan jemaah.

III.18. Persentase Belanja Pertanian terhadap seluruh Belanja

Ketahanan pangan adalah segalanya, di dalamnya termaktub cita-cita swasembada beras dan kedelai.

Sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan mencakupi program peningkatan ketahanan pangan, peningkatan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman pangan menuju swasembada berkelanjutan, swasembada daging sapi, penyediaan pangan hewan, pengembangan pertambangan SDM dan perikanan, pengembangan kelembangaan petani/nelayan/pembudidaya ikan dengan cita-cita penyediaan bahan pangan pokok dari dalam negeri, stabilitas harga, komoditas pangan, pola pangan harapan, pertumbahan sector pertanian, sukses program gemarikan.

IV. ANALISIS LRA BERHAMPIRAN TREND ANALYSIS

SAP tertengarai mendorong analisis perbandingan lintas tahun, antara lain berbentuk Neraca Perbandingan, LO Perbandingan, LAK Pebandingan dan LRA Perbandingan, untuk memamahi trendd atau kecenderungan keuangan.

Analisis berbentuk perbandingan - saldo (neraca) atau volume (LO, LAK dan LRA) - antar **pos yang sama** atau **rumpun pos yang sama** lintas tahun anggaran, menggambar kenaikan atau penurunan pos atau rumpun pos tersebut. Bila kenaikan faktual tergambar untuk beberapa tahun terakhir secara konsisten, trend tersebut mungkin diharapkan berulang terjadi di masa depan. Demikian sebaliknya.

Entitas menyikapi dengan meng-akselerasi trend yang disukai dengan (1) perubahan struktur organisasi dan sistem, dengan (2) berbagai APBN/D program, proyek dan kegiatan untuk akselerasi, demkian sebaliknya.
Contoh sederhana, jumlah aset pada neraca suatu Pemda XYZ tahun 20X1, 20X2, 20 X3 dan 20X4 adalah Rp. 20 T, 30 T, 40 T, dan 50 T. Analisis trend aset 30X2 dibanding tahun sebelumnya, yaitu 20X1, adalah Rp. 30 T dibagi 20 T atau menjadi satu setengah kali.

Analisis trend empat tahun menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat trend kenaikan aset Pemda sepanjang empat tahun terakhir analisis, dengan persentase kenaikan mengecil. Bila hal lain *ceteris paribus*, trend dapat diharapkan berlanjut–naik dalam porsi mengecil-pada periode APBD selanjutnya.

IV.1. Analisis trend Pendapatan LRA

- Trend kenaikan/penurunan PAD (entitas LK Pemda) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan pajak lokal (entitas LK Pemda) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pungutan lokal (entitas LKPemda) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan negara Pajak Penghasilan (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan pendapatan/penurunan negara Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan (VAT) (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan negara PBB (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan Bea Perolehan Tanah dan Hak Atas Tanah (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan cukai (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan Bea Masuk (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan Pajak Ekspor (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan Pajak Lain-Lain (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan PNBP (entitas LKPP dan/atau Pemda) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan Bagi Hasil, pengelolaan aset, KSO, Pengaturan Bersama dan semacamnya (LKPP dan/atau LK Pemda) antar tahun anggaran.
- Trend kenaikan/penurunan pendapatan negara bukan pajak yang lain, seperti hasil, pengelolaan aset, pendapatan sewa.

- Trend pendapatan BLU (LKPP) antar tahun anggaran.
- Trend pendapatan hibab, sumbangan, donasi, *hair cut/debt foregiveness,* antar tahun anggaran.

IV.2. Analisis trend Transfer LRA

- Trend Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil.
- Trend Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- Trend Dana Perimbangan-Dana Alokasi Umum.
- Trend Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus.
- Trend Transfer Lain Terkait Program-Dana Otonomi Khusus.
- Trend Transfer Lain Terkait Program-Dana Penyesuaian.

IV.3. Analisis trend Belanja LRA

- Trend kenaikan belanja modal.
- Trend penurunan Belanja Pegawai.
- Trend kenaikan aktivitas pembiayaan *(financing).*
- Trend kenaikan Belanja Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam APBN/D :
    a. Trend Belanja Bansos dan Bantuan Sekolah Swasta.
    b. Trend Belanja Bantuan Desa.
    c. Trend Belanja Pendidikan.
    d. Trend Belanja Kesehatan.
    e. Trend Bantuan Khusus Desa Tertinggal.
    f. Trend Bantuan UMKM.
    g. Trend Belanja Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Trend kenaikan Belanja Bunga.
- Trend kenaikan Belanja Tak Terduga.

- Analisis trend Surplus/Defisit Pendapatan vs Belanja & Transfer.
- Trend Penerimaan Pembiayaan LRA.
- Trend Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri.
- Trend Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri.
- Trend Pengeluaran Pembiayaan LRA :

    h. Trend Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri.

    i. Trend Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.

- Analisis trend Sisa Lebih/Kurang Realisasi Pembiayaan.
- Analisis trend Surplus/Defisit Realisasi APBN/D secara keseluruhan.

V. ANALISIS NISBAH KEUANGAN KHUSUS (*SPESIFIC RATIO ANALYSIS)* BAGI LRA

- Nisbah perubahan Saldo Ekuitas LKPP banding Jumlah Transfer APBN ke Pemda.
- Analisis perubahan anggaran.

    a. Kenaikan penurunan Belanja Pendidikan.

    b. Kenaikan penurunan belanja modal.

    c. Kenaikan atau penurunan berbagai jenis belanja untu kepentingan masyarakat (keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

    d. Persentase belanja pegawai terhadap PAD.

    e. Persentase belanja pegawai terhadap transfer APBN diterima Pemda.

    f. Rasio belanja pegawai terhadap belanja modal Pemda.

    g. Persenase kenaikan belanja pegawai di banding tahun lalu.

    h. Pos PAD baru banding jumlah PAD, tahun anggaran tertentu.

    i. Rasio pertumbuhan investasi BUMD Pemda, tahun ini di banding tahun baru.

    j. Rasio pertumbuhan utang Pemda (obligasi Pemda) di banding pertumbuhan belanja modal Pemda.

k. Rasio perubahan LO (*deficit* atau *surplus* banding perubahan ekuitas entitas (menurun atau meningkat).

l. Rasio APBN/D program banding reaslisasi APBN program.

m. Rasio APBN/D proyek banding reaslisasi APBN proyek.

n. Rasio APBN/D kegiatan banding reaslisasi APBN kegiatan.

o. Analisis perubahan saldo investasi dalam KSO dengan pihak swasta, tahun anggaran dibanding tahun lalu.

p. Analisis perubahan jumlah rekanan atau mitra usaha KSO tahun anggaran dibanding tahun lalu, membaik atau memburuk.

q. Analisis perubahan hasil bagi-hasil KSO, lintas tahun anggaran, membaik atau memburuk.

r. Perbandingan jumlah hibah diterima tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk.

s. Perbandingan jumlah hibah diberikan tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk.

t. Perbandingan jumlah hibah bantuan sosial tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk.

u. Rasio perubahan tahunan pendapatan pajak dibagi seluruh jumlah pendapatan.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

GASB 34 tidak memadai sebagai dasar atau bahan baku penyusunan Buletin Teknis LRA terkait Prestasi K/L, makalah ini memberi basis lebih luas dan dalam untuk pelaksanaan kewajiban hukum menjelaskan prestasi kerja terkait LRA.

Karena proses akuntansi mencakupi pelaporan LK dan tafsir hasil proses akuntansi cq tafsir LK, maka analisis LRA boleh termaktub dalam SAP.

Hampiran lain adalah penerbitan PMK tentang Penjelasan LRA sesuai kemestian hukum positif tersebut di atas, ditambah suatu perangkat lunak berbasis intelegensi artifisial, disarankan.

Dengan ingat tulus kepada saran BPK kepada KSAP menjelang akhir 2018.

[i] KSAP tidak dapat mengatur distribusi LK dan Laporan Kinerja